Pediamu : Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran
E-ISSN : 2808-764X
Vol. 1, No. 4 Oktober - Desember 2026
https://publishermu.com/index.php/pediamu/
DOI :

ANALISIS KETERBATASAN INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA DALAM MENUNJANG PROSES PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

Syamsuddin[1], Nurul Mutahara B[2], Fitriani[3]
[1, 2, 3] Program Studi Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia
[1] syamsuddin6270@unm.ac.id, [2] nurul.mutahara@unm.ac.id, [3] ani036152@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Published : 27 Nov 2026

Keywords

Infrastruktur pendidikan, sarana dan prasarana, proses pembelajaran, kualitas pendidikan, manajemen sekolah.

Educational infrastructure, facilities and infrastructure, learning process, educational quality, school management.

ABSTRACT

Keterbatasan infrastruktur pendidikan masih menjadi kendala krusial dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, terutama di wilayah pinggiran serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Artikel ini bertujuan mengkaji dampak keterbatasan sarana dan prasarana terhadap dinamika pembelajaran di sekolah serta merumuskan strategi mitigasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui telaah deskriptif-analitis terhadap regulasi standar pendidikan, buku referensi manajemen, dan artikel ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterbatasan ruang kelas, fasilitas praktikum, infrastruktur digital, dan sanitasi berdampak sistemik pada terbatasnya inovasi pengajaran guru, menurunnya motivasi belajar siswa, serta kesenjangan literasi digital. Mengatasi persoalan tersebut memerlukan perencanaan anggaran berbasis prioritas, manajemen pemeliharaan preventif, pemanfaatan media pembelajaran kontekstual berbiaya rendah, serta kemitraan multipihak yang berkelanjutan.

Limited educational infrastructure remains a crucial barrier to effective learning, particularly in suburban areas and frontier, outermost, and least developed (3T) regions. This article examines the impact of limited facilities and infrastructure on school learning dynamics and formulates mitigation strategies. The study employed a qualitative approach using library research through a descriptive-analytical review of educational standard regulations, management reference books, and scientific articles. The findings indicate that inadequate classrooms, laboratory facilities, digital infrastructure, and sanitation systemically restrict teachers' instructional innovation, reduce students' learning motivation, and widen digital literacy gaps. Addressing these challenges requires priority-based budget planning, preventive maintenance management, low-cost contextual learning media, and sustainable multi-stakeholder partnerships.

PENDAHULUAN

Pendidikan berkualitas merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, interaktif, dan bermakna, penyelenggaraan pendidikan tidak hanya bergantung pada kompetensi pendidik dan kurikulum yang relevan, tetapi juga pada dukungan fisik berupa sarana dan prasarana yang memadai. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi peserta didik.[1] Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam standar sarana dan prasarana sebagai kriteria minimal yang wajib dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan, mencakup lahan, bangunan, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang pimpinan, tempat berolahraga, hingga fasilitas penunjang lainnya.[2]

Namun, pada realitas di lapangan, ketimpangan dan keterbatasan infrastruktur pendidikan masih menjadi persoalan krusial, terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran, pedesaan, maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kondisi ruang kelas yang mengalami kerusakan struktural, ketiadaan perangkat praktikum, minimnya koleksi buku perpustakaan, serta keterbatasan jaringan internet sering kali menghambat implementasi pembelajaran modern yang berpusat pada siswa (*student-centered learning*). Ketimpangan ini menjadi tantangan bagi upaya pemerataan mutu pendidikan yang sejak lama menjadi agenda pendidikan nasional.[3]

Dalam kajian manajemen pendidikan, sarana dan prasarana tidak dipandang sekadar sebagai benda fisik, tetapi sebagai sumber daya yang perlu dikelola melalui siklus perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, hingga penghapusan.[4] Pengelolaan tersebut menjadi bagian dari kewenangan sekolah dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, yang menempatkan sekolah sebagai pengambil keputusan utama dalam mengelola sumber daya secara mandiri, partisipatif, dan akuntabel.[5] Dengan demikian, persoalan

[1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2003).
[2] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).
[3] A. Suryadi dan D. Budimansyah, *Pendidikan Nasional menuju Masyarakat Indonesia Baru* (Bandung: Genesindo, 2018).
[4] Barnawi dan Mohammad Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017).

keterbatasan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran, tetapi juga dengan kemampuan sekolah merencanakan dan mengelola aset yang dimilikinya.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana berkaitan erat dengan efektivitas pembelajaran di sekolah.[6] Pada konteks pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, tinjauan literatur juga memperlihatkan bahwa fasilitas yang dirancang khusus dan dimanfaatkan secara optimal dapat meningkatkan partisipasi siswa, tetapi distribusinya belum merata.[7] Studi di sekolah luar biasa bahkan menemukan bahwa keterbatasan dana, ketidaksesuaian alat dengan kebutuhan siswa, dan lemahnya pemeliharaan membuat sarana yang ada belum berfungsi optimal.[8] Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana perlu dipahami secara utuh, tidak hanya dari sisi ketersediaan, tetapi juga dari sisi kesesuaian, pemanfaatan, dan pemeliharaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk keterbatasan sarana dan prasarana yang umum dihadapi sekolah; (2) menganalisis dampak keterbatasan tersebut terhadap dinamika proses pembelajaran; serta (3) merumuskan strategi mitigasi dan optimalisasi pengelolaan fasilitas pendidikan. Artikel ini berargumen bahwa keterbatasan infrastruktur merupakan persoalan pedagogis, bukan semata persoalan administratif, karena secara langsung membatasi pilihan metode guru dan pengalaman belajar siswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini bertujuan membangun pemahaman konseptual dan analitis atas persoalan keterbatasan sarana dan prasarana berdasarkan regulasi, teori, dan hasil penelitian yang telah dipublikasikan, bukan mengumpulkan data lapangan dari satu sekolah tertentu.[9]

---

[5] E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021).

[6] S. Nasution, "Pengaruh Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan terhadap Efektivitas Pembelajaran di Sekolah," *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan* 4, no. 2 (2019): 112–20.

[7] Ermelinda Yosefa Awe, Nyoman Dantes, dan Desak Putu Parmiti, "Pemanfaatan Fasilitas Pendidikan dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus," *JOEAI (Journal of Education and Instruction)* 8, no. 6 (2025): 879–88.

[8] Ahmad Musyafa, Luqi Darmawan, dan Muhammad Syuhada' Subir, "Analisis Efektifitas Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Proses Belajar Siswa Berkebutuhan Khusus: Studi Kasus di Sekolah Luar Biasa," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 8, no. 2 (2025): 5856–64.

[9] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

Data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai sumber sekunder yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan terkait standar sarana dan prasarana pendidikan, buku referensi manajemen pendidikan, serta artikel ilmiah yang membahas hubungan sarana dan prasarana dengan pembelajaran. Sumber dipilih berdasarkan tiga kriteria, yaitu (1) relevan dengan fokus sarana, prasarana, dan proses pembelajaran; (2) berasal dari penerbit, lembaga, atau jurnal yang dapat dipertanggungjawabkan; serta (3) memberikan informasi yang dapat dibandingkan satu sama lain. Ringkasan sumber yang ditelaah disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kelompok Sumber Kepustakaan yang Ditelaah

No.	Kelompok Sumber	Contoh Sumber	Fokus Telaah
1	Regulasi	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023	Kewajiban dan standar minimal sarana dan prasarana
2	Buku manajemen dan media pendidikan	Barnawi dan Arifin; Mulyasa; Arsyad	Pengelolaan aset sekolah dan pemanfaatan media pembelajaran
3	Artikel ilmiah	Nasution; Awe, Dantes, dan Parmiti; Musyafa, Darmawan, dan Subir; Septiyani dan Permana	Hubungan fasilitas dengan efektivitas, partisipasi, dan pemeliharaan

Sumber: Hasil penelusuran pustaka penulis, 2026.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[10] Pada tahap kondensasi, isi setiap sumber dibaca dan dicatat sesuai tiga fokus kajian, yaitu bentuk keterbatasan, dampak terhadap pembelajaran, dan strategi penanganan. Pada tahap penyajian, catatan tersebut dikelompokkan ke dalam kategori temuan dan disajikan dalam bentuk uraian tematik. Kesimpulan ditarik dengan membandingkan dan memadukan temuan dari berbagai sumber sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Keterbatasan Sarana dan Prasarana Sekolah

Secara konseptual, sarana pendidikan merujuk pada seluruh peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan, seperti meja, kursi, papan tulis, alat peraga, dan perangkat komputer, sedangkan prasarana pendidikan merupakan fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan,

[10] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-3 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014).

seperti gedung sekolah, ruang kelas, halaman, jaringan listrik, dan sanitasi.[11] Pembedaan ini penting karena kedua jenis fasilitas tersebut memiliki pola kebutuhan, biaya, dan pemeliharaan yang berbeda.

Berdasarkan hasil telaah literatur, keterbatasan infrastruktur di sekolah umumnya terklasifikasi dalam empat aspek utama berikut.

1. Ruang belajar utama. Banyak sekolah masih menghadapi persoalan ruang kelas dengan kategori rusak ringan hingga berat, ventilasi dan pencahayaan yang buruk, serta kapasitas ruangan yang tidak sebanding dengan jumlah siswa (*overcapacity*). Kondisi ini mengganggu kenyamanan fisik, menurunkan konsentrasi, dan menimbulkan risiko keselamatan bagi warga sekolah.
2. Fasilitas praktikum dan literasi. Ketiadaan laboratorium IPA maupun komputer yang memenuhi standar, alat peraga yang sudah usang, serta koleksi buku perpustakaan yang tidak diperbarui membuat pembelajaran cenderung berlangsung satu arah secara teoretis dan minim pengalaman praktik langsung.
3. Infrastruktur digital. Minimnya ketersediaan proyektor dan perangkat komputer, jaringan listrik yang tidak stabil, serta ketiadaan akses internet berkecepatan memadai menghambat integrasi media pembelajaran interaktif serta pengembangan literasi digital siswa maupun guru.
4. Fasilitas penunjang dan sanitasi. Keterbatasan air bersih, toilet yang tidak layak pakai, serta minimnya fasilitas ramah disabilitas berdampak langsung pada kesehatan lingkungan sekolah, menurunkan tingkat kehadiran siswa, dan membatasi aksesibilitas belajar.

Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur tidak hanya menyangkut bangunan, tetapi juga perlengkapan belajar, teknologi, dan layanan dasar. Standar sarana dan prasarana menempatkan seluruh aspek tersebut sebagai bagian dari kriteria minimal yang harus dipenuhi satuan pendidikan.[12] Khusus pada aspek fasilitas ramah disabilitas, kewajiban sekolah juga diperkuat oleh ketentuan tentang hak penyandang disabilitas dan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.[13] Dengan demikian, sekolah yang belum menyediakan akses fisik yang

[11] Barnawi dan Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*.
[12] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023*.
[13] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2016); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal,*

memadai bukan hanya menghadapi persoalan kenyamanan, tetapi juga belum memenuhi hak sebagian peserta didiknya.

Dampak Keterbatasan Infrastruktur terhadap Proses Pembelajaran

Keterbatasan sarana dan prasarana tidak sekadar menjadi persoalan administratif atau fisik, tetapi berdampak sistemik pada tiga dimensi utama pembelajaran.

Terbatasnya Inovasi Metode Pengajaran Guru

Guru sering kali terpaksa kembali pada metode pembelajaran konvensional berbasis ceramah (*teacher-centered*) karena ketiadaan alat bantu visual maupun fasilitas laboratorium. Misalnya, mata pelajaran sains yang seharusnya menuntut pembuktian melalui eksperimen hanya disampaikan melalui hafalan konsep. Akibatnya, keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*problem solving*) siswa kurang terasah secara optimal.

Kajian tentang media pembelajaran menjelaskan bahwa media berfungsi membantu siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih konkret sehingga konsep yang abstrak lebih mudah dipahami.[14] Ketika media dan alat praktik tidak tersedia, guru kehilangan salah satu sarana penting untuk menghadirkan pengalaman tersebut. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat membentuk kebiasaan mengajar yang bertumpu pada penjelasan verbal, bahkan ketika kurikulum menuntut pembelajaran yang aktif dan berbasis pengalaman.

Menurunnya Motivasi dan Keterlibatan Siswa

Lingkungan belajar yang tidak nyaman, seperti ruang kelas yang panas, bising, atau bocor saat hujan, secara psikologis mengurangi fokus dan antusiasme siswa dalam mengikuti pelajaran. Selain itu, ketiadaan media pembelajaran yang menarik membuat siswa lebih cepat mengalami kejenuhan kognitif.

Hubungan antara kondisi fasilitas dan keterlibatan siswa juga tampak dalam kajian yang menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran.[15] Pada kelompok peserta didik berkebutuhan khusus, fasilitas yang sesuai dan dimanfaatkan secara optimal bahkan dilaporkan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan belajar.[16] Temuan ini menegaskan bahwa kenyamanan

Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

[14] Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

[15] Nasution, "Pengaruh Ketersediaan Sarana dan Prasarana."

[16] Awe, Dantes, dan Parmiti, "Pemanfaatan Fasilitas Pendidikan."

dan kesesuaian lingkungan belajar merupakan prasyarat bagi tumbuhnya motivasi, bukan sekadar pelengkap.

Kesenjangan Kompetensi dan Literasi Digital

Di era transformasi digital, sekolah yang tidak memiliki akses perangkat keras maupun konektivitas internet menghadapi hambatan besar dalam mengakses sumber belajar terbuka (*open educational resources*). Hal ini menciptakan kesenjangan kualitas lulusan antara sekolah yang memiliki infrastruktur mapan di perkotaan dan sekolah yang serba terbatas di wilayah pedesaan.

Kesenjangan tersebut tidak hanya dialami siswa, tetapi juga guru. Guru yang bekerja di sekolah dengan infrastruktur digital terbatas memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk berlatih menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Akibatnya, kesenjangan infrastruktur dapat berkembang menjadi kesenjangan kompetensi, yang pada gilirannya memperlebar perbedaan mutu pembelajaran antarwilayah.

Strategi Mitigasi dan Optimalisasi Pengelolaan

Untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur secara berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan manajemen internal sekolah maupun dukungan eksternal.

1. Perencanaan anggaran berbasis prioritas. Sekolah perlu menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara transparan dengan memprioritaskan perbaikan fasilitas yang berdampak langsung pada keselamatan dan efektivitas belajar siswa, serta menggunakan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) secara tepat sasaran.
2. Manajemen pemeliharaan preventif. Sekolah perlu membudayakan pemeliharaan rutin terhadap aset agar kerusakan ringan dapat segera diperbaiki sebelum berkembang menjadi kerusakan berat yang membutuhkan biaya rehabilitasi besar.
3. Pemanfaatan media pembelajaran alternatif dan kontekstual. Pendidik didorong untuk mengembangkan alat peraga sederhana berbasis bahan lokal (*low-cost materials*) serta memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai laboratorium alam.
4. Kemitraan multipihak. Sekolah perlu menjalin kolaborasi dengan komite sekolah, alumni, pemerintah daerah, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*/CSR) untuk membantu pengadaan perangkat teknologi maupun renovasi fisik bangunan.

Strategi pertama dan kedua berkaitan erat dengan siklus pengelolaan sarana dan prasarana. Perencanaan yang baik dimulai dari inventarisasi kondisi aset, sehingga sekolah mengetahui fasilitas mana yang paling mendesak untuk diperbaiki atau diadakan.[17] Pemeliharaan preventif juga lebih hemat daripada perbaikan setelah kerusakan berat terjadi. Penelitian di sekolah luar biasa menunjukkan bahwa lemahnya pemeliharaan membuat sebagian alat tidak dapat digunakan secara optimal,[18] sementara penelitian lain merekomendasikan perencanaan berbasis kebutuhan dan evaluasi berkala sebagai dasar pengelolaan sarana.[19]

Strategi ketiga menempatkan guru sebagai aktor penting dalam menyiasati keterbatasan. Media sederhana yang dibuat dari bahan di sekitar sekolah dapat menghadirkan pengalaman konkret bagi siswa tanpa biaya besar.[20] Meskipun demikian, strategi ini sebaiknya dipandang sebagai pelengkap, bukan pengganti kewajiban pemenuhan standar sarana yang menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan.

Strategi keempat sejalan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah yang menekankan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.[21] Keterlibatan komite sekolah, alumni, pemerintah daerah, dan dunia usaha dapat memperluas sumber daya yang tersedia, asalkan dikelola secara transparan dan diarahkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan dalam perencanaan sekolah.

Pembahasan

Hasil telaah menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana bekerja melalui rantai dampak yang saling terhubung. Keterbatasan fisik membatasi pilihan metode guru; metode yang terbatas menurunkan keterlibatan siswa; dan rendahnya keterlibatan, terutama dalam pemanfaatan teknologi, memperlebar kesenjangan kompetensi antarwilayah. Karena itu, upaya perbaikan yang hanya berfokus pada satu titik, misalnya pengadaan perangkat tanpa pelatihan guru atau pembangunan ruang tanpa rencana pemeliharaan, cenderung tidak memberikan hasil yang optimal.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur memiliki dimensi tata kelola yang kuat. Standar nasional telah menetapkan kriteria minimal,[22] tetapi

[17] Barnawi dan Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*.
[18] Musyafa, Darmawan, dan Subir, "Analisis Efektifitas Sarana."
[19] Jihan Indah Septiyani dan Hinggil Permana, "Analisis Sarana dan Prasarana pada Sekolah Luar Biasa C Tunas Harapan Karawang," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 3 (2026): 377–92.
[20] Arsyad, *Media Pembelajaran*.
[21] Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*.
[22] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023*.

pemenuhannya sangat bergantung pada kemampuan sekolah merencanakan, memprioritaskan, dan memelihara aset. Dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, kemampuan tersebut merupakan bagian dari kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dan partisipasi warga sekolah.[23] Sekolah dengan anggaran yang sama dapat memiliki kondisi fasilitas yang berbeda karena perbedaan kualitas perencanaan dan pemeliharaan.

Selain itu, ketimpangan infrastruktur antarwilayah menuntut kebijakan afirmatif dari pemerintah. Sekolah di daerah 3T tidak dapat diharapkan menutup kekurangannya hanya melalui kreativitas guru atau kemitraan lokal, karena keterbatasan yang mereka hadapi sering kali bersifat mendasar, seperti listrik, air bersih, dan akses internet. Pemerataan mutu pendidikan memerlukan intervensi yang mempertimbangkan perbedaan kondisi awal setiap sekolah.[24]

Implikasi Penelitian

Implikasi Teoretis

Kajian ini memperkuat pandangan bahwa sarana dan prasarana merupakan variabel pedagogis, bukan sekadar variabel administratif. Kerangka analisis yang menghubungkan bentuk keterbatasan, dampaknya pada pembelajaran, dan strategi penanganan dapat digunakan sebagai dasar penelitian empiris berikutnya, misalnya untuk mengukur sejauh mana perbaikan fasilitas tertentu berpengaruh terhadap perubahan praktik mengajar guru.

Implikasi Praktis

Temuan kajian ini memberikan beberapa implikasi praktis berikut.

1. Bagi kepala sekolah: menyusun inventarisasi aset dan peta prioritas perbaikan sebagai dasar penyusunan RKAS, serta menetapkan jadwal pemeliharaan rutin.
2. Bagi guru: mengembangkan media pembelajaran kontekstual berbiaya rendah dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar ketika fasilitas belum memadai.
3. Bagi komite sekolah dan masyarakat: terlibat aktif dalam perencanaan dan pengawasan pemanfaatan dukungan untuk perbaikan fasilitas sekolah.

Implikasi Kebijakan

Pemerintah pusat dan daerah perlu memprioritaskan bantuan rehabilitasi dan pengadaan sarana bagi sekolah dengan kondisi paling tertinggal, terutama di daerah 3T,

[23] Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*.
[24] Suryadi dan Budimansyah, *Pendidikan Nasional*.

serta memastikan bahwa setiap bantuan disertai pelatihan pemanfaatan dan dukungan pemeliharaan agar fasilitas yang diadakan dapat digunakan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Keterbatasan infrastruktur sarana dan prasarana memiliki keterkaitan yang kuat dengan penurunan efektivitas proses pembelajaran di sekolah. Hambatan pada ruang belajar, fasilitas praktikum, infrastruktur digital, dan sanitasi secara langsung membatasi kreativitas metode pengajaran guru, menurunkan motivasi serta konsentrasi siswa, dan memicu kesenjangan capaian pendidikan. Dampak tersebut saling berkaitan sehingga penanganannya perlu dilakukan secara terpadu.

Mengatasi persoalan ini membutuhkan kombinasi antara kebijakan pemerataan anggaran pendidikan dari pemerintah, penguatan tata kelola dan pemeliharaan aset oleh manajemen sekolah, kreativitas guru dalam mengoptimalkan sumber daya kontekstual, serta kemitraan multipihak yang berkelanjutan. Kajian ini terbatas pada telaah kepustakaan sehingga penelitian selanjutnya disarankan menguji temuan tersebut melalui studi lapangan di sekolah dengan karakteristik wilayah yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Azhar. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Awe, Ermelinda Yosefa, Nyoman Dantes, dan Desak Putu Parmiti. "Pemanfaatan Fasilitas Pendidikan dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus." *JOEAI (Journal of Education and Instruction)* 8, no. 6 (2025): 879–88.

Barnawi dan Mohammad Arifin. *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Ed. ke-3. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.

Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Musyafa, Ahmad, Luqi Darmawan, dan Muhammad Syuhada' Subir. "Analisis Efektifitas Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Proses Belajar Siswa Berkebutuhan Khusus: Studi Kasus di Sekolah Luar Biasa." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 8, no. 2 (2025): 5856–64.

Nasution, S. "Pengaruh Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan terhadap Efektivitas Pembelajaran di Sekolah." *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan* 4, no. 2 (2019): 112–20.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2003.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2016.

Septiyani, Jihan Indah, dan Hinggil Permana. "Analisis Sarana dan Prasarana pada Sekolah Luar Biasa C Tunas Harapan Karawang." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 3 (2026): 377–92.

Suryadi, A., dan D. Budimansyah. *Pendidikan Nasional menuju Masyarakat Indonesia Baru*. Bandung: Genesindo, 2018.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.